

Judul : Ikut sukseskan progam MBG, sektor perikanan air tawar bisa pasok kebutuhan gizi
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ikut Sukseskan Program MBG

Sektor Perikanan Air Tawar Bisa Pasok Kebutuhan Gizi

Senayan mendorong pengembangan potensi perikanan budi daya air tawar guna mendukung ketahanan pangan nasional. Sektor ini dianggap sebagai kekuatan baru memasok kebutuhan protein dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menjelaskan, selama ini sektor perikanan sering kali hanya identik dengan hasil tangkapan laut saja. Padahal, budi daya air tawar menyimpan peluang besar yang belum tergarap optimal. Makanya, sektor ini perlu didorong agar seluruh program lebih tertata serta memiliki fokus jelas.

Penguatan budi daya ikan air tawar jadi langkah strategis menciptakan sumber pasokan pangan yang stabil berkelanjutan. "Kebutuhan protein dari komoditas ikan diperkirakan terus meningkat pesat seiring dengan implementasi program MBG yang mulai dijalankan secara masif di berbagai daerah Indonesia," ujarnya, kemarin.

Pihaknya mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pengembangan model budi daya yang terbukti efektif. Pendekatan se-

perti bioflok, kampung budidaya, hingga sistem mina padi bisa jadi solusi konkret guna meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas jangkauan produksi pangan nasional.

Untuk sistem bioflok, kata dia, mampu mempercepat masa panen ikan, sedangkan konsep kampung budidaya berfungsi memperluas basis produksi masyarakat. Selain itu, sistem mina padi memiliki potensi besar untuk dihidupkan kembali. Itu juga jadi upaya memperkuat kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal di wilayah pedesaan.

Selanjutnya, sektor hulu juga harus diperkuat melalui penyediaan pakan ikan yang berkualitas bagi seluruh pembudidaya. Pakan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan produksi. Selain itu, pakan juga jadi tolok ukur efisiensi biaya operasional bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya



Panggah Susanto

pada sektor perikanan budidaya.

Panggah meyakini, sektor perikanan budidaya air tawar bisa jadi tulang punggung baru dalam mendukung ketahanan pangan nasional kita. Karena itu, penggunaan pakan berbasis bahan baku lokal harus terus ditingkatkan. "Agar harganya lebih murah dan lebih mudah diakses oleh para pembudidaya ikan di daerah," ucapnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengapresiasi berbagai inovasi alat pengasapan ikan yang terus berkembang. Meski hanya berupa perangkat

sederhana, tapi punya manfaat besar bagi para pembudidaya. Apalagi, harganya cukup terjangkau serta mampu meningkatkan nilai tambah pada produk hasil perikanan.

Alat tersebut sangat membantu bagi para pembudidaya yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan mesin pendingin atau freezer. Berbagai jenis ikan seperti lele bisa langsung diasap menggunakan alat itu, sehingga produknya bisa segera dipasarkan ke masyarakat luas dengan kualitas yang terjaga.

Titiek mendorong agar inovasi alat pengasapan ikan tersebut dapat diproduksi massal dalam jumlah banyak. Inovasi ini nantinya bisa didistribusikan sebagai bantuan nyata kepada para pembudidaya ikan di seluruh wilayah Indonesia. "Alat itu bisa dipakai untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif mereka," terang Titiek.

Teknologi bioflok yang dikembangkan, lanjutnya, juga mampu menekan biaya produksi sekaligus mempercepat masa panen bagi para pembudidaya ikan. Inovasi teknologi seperti ini jadi solusi nyata dalam meningkatkan efisiensi usaha serta

memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat yang menjalankan bisnis perikanan.

Berbagai produk olahan hasil perikanan memiliki peluang pasar sangat luas untuk mendukung kebutuhan dapur program strategis MBG. "Ini sekaligus membuka pintu pasar baru bagi produk-produk perikanan lokal sehingga perekonomian para nelayan dan pembudidaya ikan bisa tumbuh lebih pesat," katanya.

Namun di saat yang sama, kata dia, Pemerintah harus segera menyelesaikan sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh perikanan di lapangan. Saat ini, jumlah penyuluh yang tersedia di berbagai daerah masih sangat jauh dari angka kebutuhan ideal untuk mendampingi para pembudidaya ikan.

Data menunjukkan, jumlah penyuluh perikanan saat ini tercatat masih kurang dari 4 ribu orang di seluruh Indonesia. "Untuk menjangkau seluruh pelosok negeri secara optimal, Pemerintah idealnya membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga penyuluh yang bertugas memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat," tandasnya. ■ PVB